

ABSTRAK

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah provinsi hingga kabupaten/kota serta memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya dengan menganut sistem asas desentralisasi, sebagaimana Kota Salatiga yang diberi kewenangan untuk memungut pajak BPHTB. Otonomi daerah menjadikan Pemerintah Kota Salatiga dapat menetapkan peraturan daerah mengenai sistem dan prosedur pemungutan BPHTB sebagai landasan dalam melaksanakan kewenangan pemungutan pajak BPHTB sebagai pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pemerintah Kota Salatiga dalam menetapkan sistem dan prosedur pemungutan BPHTB yang diimplementasikan pada suatu produk hukum peraturan walikota dapat dilaksanakan dengan baik sehingga BPHTB berdampak cukup besar bagi pendapatan asli daerah, meskipun tetap terjadi hambatan dalam pemungutannya. Solusi-solusi terbaik demi meminimalisir hambatan pemungutan BPHTB akan terus dicetuskan dan dilaksanakan perlahan-lahan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Salatiga demi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Kota Salatiga, BPHTB

ABSTRACT

Indonesia is a unitary state dividing its territory into several provincial areas to regencies / cities and granting authority to local governments to manage their regions by adopting a decentralized principle system, because the Salatiga City is given the authority to collect BPHTB tax. Regional autonomy allows the Salatiga City Government to establish local regulations regarding the system and procedures for collecting BPHTB as a basis for exercising authority to collect BPHTB taxes as local taxes. The research method used is the empirical juridical method, namely legal research conducted by examining secondary data first then proceeding with conducting field research. The results of the study can be concluded that the authority of the Salatiga City Government in determining the system and procedures for collecting BPHTB that are implemented in the mayor regulations on legal products can be implemented properly so that the BPHTB has a significant impact on regional income, although there are still obstacles in the collection. The best solution to minimize barriers to BPHTB collection will continue to be triggered and implemented slowly through policies issued by the Salatiga City Government for the welfare of the community.

Keywords : *The Authority of Salatiga City Government, BPHTB*